



ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO

Volume 2, Nomor 1, Februari 2013



Permasalahan Aktual Kebudayaan
di Provinsi Sulawesi Tengah

Kepemimpinan Lokal dalam Pelestarian
Budaya Buton pada Masyarakat
Katobengke di Kota Bau-Bau

Ritual *Puhora'ano Sangia* pada Masyarakat
Cia-Cia Burangasi Kabupaten Buton

Interaksi Sosial Pengikut Ahmadiyah
Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten
Konawe Selatan

Etos Kerja dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat Tolaki di Kecamatan Tongauna
Kabupaten Konawe

Makna Hutan Bagi Masyarakat Adat
Kajang, Suatu Kearifan Lokal dalam
Pelestarian Lingkungan

Komunikasi Simbolik Masjid Agung Keraton Buton
(Mengungkap Eksistensi Masjid dan Ekspresi
Kesadaran Integratif Kolektif dalam Sistem Sosial
Kultural Masyarakat Buton)

Tradisi Lisan *Kinoho/Lolamoa* (Pantun):
Pesan Kearifan Lokal pada Masyarakat
Etnis Tolaki di Kabupaten Konawe
Sulawesi Tenggara

Model Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi
Katoba dalam Budaya Masyarakat Muna di
Sulawesi Tenggara (Suatu Kajian Komunikasi
Budaya Sebagai Upaya Pelestarian Kearifan Lokal)

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara elektronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL BUDAYA
VOL. 02-NO.01-FEBRUARI 2013
ISSN: 2252-9144

Penasihat

Dekan FISIP Universitas Haluoleo
Ketua Jurusan Antropologi Universitas Haluoleo

Penanggung Jawab

Kepala Laboratorium Jurusan Antropologi
FISIP Universitas Haluoleo

Pemimpin Redaksi
Laxmi, S.Sos., M.A

Wakil Pemimpin Redaksi

Akhmad Marhad, S.Sos., M.Si

Sekretaris Redaksi

Raemon, S.Sos., M.A.

Dewan Redaksi

Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafsa, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.

Drs. Syamsumarlin, M.Si

Dra. Hasniah, M.Si

Hartini, S.Sos., M.Si

La. Janu, S.Sos., M.A.

Ashmarita, S.Sos., M.Si

La Ode Anis, S.Sos., M.A.

Rahmawati, S.Pd., M.A.

Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.

Penelaah Ahli

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (Unhalu),

Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, MA (Unhas),

Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, MA. (Untad)

Dr. Lono Lastoro Simatupang, MA (UGM),

Dr. Nicolas Waroow, MA (UGM),

Dr. Mungsi Lampe, M.A (Unhas).

Tata Usaha

Hadrianti

Ade Rahman

Reni

Sirkulasi

Rahman, S.Sos., M.Si.

Alham Haidir

Keuangan

Risnawati

Etnoreflika Online

Rahmat Sewa Soraya, S.Sos., M.Si.

Ade Makmur

Edo Sanjani

Penerbit

Laboratorium Jurusan Antropologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Haluoleo

Alamat Redaksi

Jl. H.E.Agus Salim Mokadompit, FISIP

Ruangan Laboratorium Antropologi.

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika Volume 2 Nomor 1 bulan Februari tahun 2013 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 1 Nomor 2, Februari 2013, memuat tulisan sebagai berikut:

- Permasalahan Aktual Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kepemimpinan Lokal dalam Pelestarian Budaya Buton pada Masyarakat Katobengke di Kota Bau-bau.
- Ritual *Puhora'ano Sangia* pada Masyarakat Cia-cia Burangasi Kabupaten Buton.
- Interaksi Sosial Pengikut Ahmadiyah Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan.
- Etos Kerja dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tolaki di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Makna Hutan Bagi Masyarakat Adat Kajang, Suatu Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan.
- Komunikasi Simbolik Masjid Agung Keraton Buton (Mengungkap Eksistensi Masjid dan Ekspresi Kesadaran Integratif Kolektif dalam Sistem Sosial Kultural Masyarakat Buton).
- Tradisi Lisan *Kinoho/Lolamoa* (Pantun): Pesan Kearifan Lokal pada Masyarakat Etnis Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
- Model Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi *Katoba* dalam Budaya Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara (Suatu Kajian Komunikasi Budaya Sebagai Upaya Pelestarian Kearifan Lokal)

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

Sulaiman Mamar	102-109	Permasalahan Aktual Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah
Muh. Amir	110-117	Kepemimpinan Lokal dalam Pelestarian Budaya Buton pada Masyarakat Katobengke di Kota Bau-bau
La Janu	118-123	Ritual <i>Puhora'ano Sangia</i> pada Masyarakat Cia-cia Burangasi Kabupaten Buton
Dewi Anggraini	124-135	Interaksi Sosial Pengikut Ahmadiyah Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan
Sarmadan	136-149	Etos Kerja dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tolaki di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe
Jumrana	150-160	Makna Hutan bagi Masyarakat Adat Kajang, Suatu Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan
La Ode Jumaidin	161-170	Komunikasi Simbolik Masjid Agung Keraton Buton (Mengungkap Eksistensi Masjid dan Ekspresi Kesadaran Integratif Kolektif dalam Sistem Sosial Kultural Masyarakat Buton)
Sutiyana Fachruddin Asriani	171-178	Tradisi Lisan <i>Kinoho/Lolamoa</i> (Pantun): Pesan Kearifan Lokal pada Masyarakat Etnis Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
Hasriany Amin	179-191	Model Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi <i>Katoba</i> dalam Budaya Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara (Suatu Kajian Komunikasi Budaya Sebagai Upaya Pelestarian Kearifan Lokal)

**PERMASALAHAN AKTUAL KEBUDAYAAN
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH****Sulaiman Mamar*****ABSTRAK**

Tulisan ini berupaya mengkaji permasalahan aktual kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan komposisi penduduk yang multikultural dan mendiami wilayah yang luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah. Hal tersebut dianggap memberikan peluang terjadinya permasalahan kebudayaan, seperti: (1) timbulnya degradasi nilai budaya, sehingga budaya berpikir positif kurang berfungsi lagi sebagai pedoman tingkah laku; (2) kesenjangan etos kerja antara suku bangsa dalam penguasaan sumber daya alam strategis; (3) munculnya permasalahan isu suku bangsa asli atau putra daerah yang dipertentangkan dengan suku bangsa pendatang; (4) kebiasaan mengkonsumsi minuman terlarang dan narkoba yang selanjutnya menimbulkan permasalahan sosial seperti perkelahian antar warga. Hal yang menarik dalam tulisan ini adalah bahwa tarian *modero* sebagai salah satu jenis seni tari yang telah dimodifikasi di Sulawesi Tengah juga dianggap memberikan peluang terjadinya permasalahan sosial budaya. Untuk mengeliminir permasalahan kebudayaan tersebut, ada beberapa pendekatan yang perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu (1) perlu penggalian dan transformasi budaya berpikir positif setiap suku bangsa kepada generasi muda, (2) pendidikan etika perlu digalakkan kepada generasi muda, baik di rumah tangga maupun di sekolah, (3) pendidikan multikultur perlu dimasukkan dalam kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi, (4) pemberdayaan ekonomi para pemuda.

Kata kunci: *modero*, permasalahan kebudayaan, multikultural

ABSTRACT

*This paper attempts to examine the actual problems of culture in Central Sulawesi province. Central Sulawesi is one of the provinces in Indonesia with the multicultural composition of the population and inhabit a wide area with the population density is very low. It is considered to provide opportunities for cultural issues, such as: (1) the onset of degradation of cultural values, so that the culture of positive thinking poorly functioning again as a guide behavior, (2) work ethic disparities between ethnic groups in the control of strategic natural resources, (3) emergence of problems or issues of indigenous tribes native son as opposed to ethnic immigrants, (4) the habit of consuming beverages and illicit drugs which further lead to social problems such as fights between residents. The interesting thing in this paper is that the dance *modero* as one type of dance that has been modified in Central Sulawesi is also considered to provide opportunities for social and cultural issues. To eliminate the problem of culture, there are several approaches that need to be implemented in public life, that is (1) necessary excavation and transformation of culture positive thinking each tribe to the younger generation, (2) ethics education to the younger generation should be encouraged, both in the household and in schools, (3) multicultural education should be included in the curriculum in schools and colleges, (4) the economic empowerment of youth.*

Key word: *modero* dance, problems of culture, multicultural

* Makalah disampaikan pada dialog budaya dilaksanakan oleh Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI) Di Swiss-Belhotel Internasional Kendari, tanggal 18 Oktober 2012.

** Guru Besar Antropologi Pembangunan Universitas Tadulako.

A. PENDAHULUAN

Sulawesi Tengah resmi menjadi Provinsi tahun 1964, memiliki luas wilayah 68.033,71 km yang terdiri atas wilayah daratan 52.952,29 km dan wilayah laut mencapai 120.986 km dengan garis pantai terpanjang di Indonesia, yaitu 4.013 km. Adapun jumlah penduduk menurut hasil sensus BPS 2009 adalah 489,84 ribu jiwa. Dengan demikian, kepadatan penduduk provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2009 adalah rata-rata 35 jiwa/km.

Penduduk Sulawesi Tengah bersifat multikultural, yaitu terdiri atas kurang lebih 60 suku bangsa, baik suku bangsa mirgan lama maupun migran baru. Suku bangsa migran lama atau "penduduk pendatang lama" seperti suku bangsa To Kaili, To Kulawi, To Lindu, To Sidondo, To Tialo, To Lauje, To Tajio, To Ranggonau, To Parigi, To Toli-Toli, To Buol, To Pamona, To Napu, To Bungku, To Kolonodale, To Tojo, To Una-Una, To Banggai, To Balanta, To Saluan dan To Bangkep, To Balinggi, To Payapi, To Patimbe, To Baku (Mattulada, tanpa tahun).

Sedangkan suku bangsa migran baru atau "penduduk pendatang baru" antara lain seperti suku bangsa Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Minahasa, Jawa, Sunda, Bali, Madura, Betawi, Sangir, Flores, Banjar, Gorontalo, Batak, Minangkau, Aceh, Buton, Dayak, Ambon, Lampung, Palembang, Ternate, Muna, Arab, India, Tionghoa. Suku-suku bangsa tersebut menganut lima macam agama yang diakui pemerintah dan sebagian penduduk lainnya yang tergolong masyarakat terasing masih menganut agama animisme (Sulaiman Mamar, 2009)

Setelah mengalami pemekaran pada tahun 2000-an, Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 10 kabupaten dan satu ibu kota yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso,

Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali; Kabupaten Luwuk Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Selain pemekaran kabupaten, telah dilakukan pula pemekaran desa dan kecamatan sehingga menjadi 1.547 desa/ kelurahan dan 115 kecamatan.

Fenomena mengenai luasnya wilayah yang sangat variatif seperti berupa lembah, pegunungan dan pegunungan tinggi, kepadatan penduduk yang sangat rendah dan penduduk yang bersifat multikultur sudah barang tentu akan memberi peluang terjadinya berbagai permasalahan, baik permasalahan ekonomi, politik, hukum, agama, dan terutama permasalahan kebudayaan.

B. PERMASALAHAN AKTUAL KEBUDAYAAN

Berdasarkan dengan uraian pada bagian pendahuluan, maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa permasalahan kebudayaan yang dipandang aktual yang sampai sekarang ini masih sering terjadi dan ditemukan pada suku-suku bangsa di provinsi Sulawesi Tengah. Permasalahan kebudayaan tersebut antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut di bawah ini.

1. Degradasi Sistem Nilai Budaya

Sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk Sulawesi Tengah bersifat multikultur yang memiliki sistem nilai budaya atau budaya berpikir positif yang seyogyanya berfungsi sebagai pedoman tingkah laku warga suku bangsa masing-masing. Sistem nilai budaya adalah suatu konsepsi yang hidup dalam alam pikiran manusia mengenai hal-hal yang mereka anggap amat bernilai dalam kehidupan dan berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari (Koentjaraningrat, 1983). Sedangkan budaya berpikir positif adalah khasanah warisan budaya bangsa yang tak ternilai

harganya dan merupakan spirit yang dapat memberi motivasi dan kreatifitas dalam kehidupan keseharian warga masyarakat pendukung setiap kelompok etnis tertentu (Jero Wacik, 2008).

Namun secara empirik, sistem nilai budaya atau budaya berpikir positif tersebut telah mengalami degradasi sehingga kurang berfungsi lagi sebagai pedoman tingkah laku manusia. Fenomena itu terjadi karena selain pengaruh unsur kebudayaan materi yang sangat kuat, juga pikiran negatif lebih menonjol pada diri sebagian besar warga negara Indonesia. Hasil penelitian Sulaiman Mamar, dkk (2009) mengenai budaya berpikir positif di Kabupaten Poso menemukan bahwa dari 32 suku bangsa yang bermukim di Kabupaten Poso, pada umumnya generasi muda warga suku bangsa tersebut tidak memahami lagi nilai-nilai budaya suku bangsanya dalam bahasa daerah. Oleh karena itu, tidak berfungsi lagi sebagai pedoman tingkah laku mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena terjadinya degradasi sistem nilai budaya atau budaya berpikir positif tersebut dapat disimak dari berbagai perilaku kekerasan dan peristiwa konflik dalam masyarakat di kabupaten Poso dan beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Sebagai contoh, masyarakat Poso yang mengalami konflik horizontal selama 8 tahun (1998-2006). Dan bahkan sampai sekarang masih sering terjadi teror bom di berbagai pemukiman masyarakat Kota Poso.

Sebagaimana diketahui bahwa Suku bangsa Pamona sebagai migran lama di Kabupaten Poso memiliki nilai budaya “*sintuwu maroso*” yang mengandung 3 makna utama, yaitu: (a) hidup saling menghargai (*tuwu mombetuwunaka*); (b) hidup saling menghidupi (*tuwu mombepatuwu*); dan (c) hidup saling tolong menolong (*tuwu mombesungko*). Ketiga makna falsafah hidup *sintuwu maroso* tersebut seyogyanya berfungsi sebagai pedoman tingkah laku orang Pamona dan masyarakat Poso lainnya

(Sulaiman Mamar, 2009). Namun dalam kenyataan di lapangan, falsafah hidup itu tidak berfungsi lagi sehingga terjadi konflik yang mengakibatkan terbunuhnya kurang lebih 2.000 orang, terbakarnya kurang lebih 60.000 rumah penduduk dan rusaknya harta benda yang tidak terhitung nilainya (Suriari Mappangara, ed, 2001).

Berkaitan dengan konflik Poso tersebut, Rizali Djaelangkara (2011) secara rinci mengidentifikasi permasalahan kebudayaan di Kabupaten Poso, yaitu meliputi (a) terjadinya marjinalisasi penduduk lokal sebagai akibat dari pengaruh penduduk pendatang menguasai sumber daya alam strategis, (b) terjadi dikotomi konsep daerah pesisir yang dikuasai suku bangsa pendatang dan daerah pegunungan yang dikuasai suku bangsa lokal, (c) rekrutmen politik dan berokrasi yang tidak adil, (d) adanya ide tentang perubahan status Kota Poso menjadi kotamadya dan rencana pembentukan Kabupaten Pamona.

Selain peristiwa konflik yang terjadi pada masyarakat Poso, konflik terjadi juga di beberapa kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain sebagai berikut:

- a. Konflik yang terjadi di Kabupaten Buol, dipicu oleh persoalan pilkada dan kebijakan Bupati yang bersifat diskriminatif, nepotisme dan korupsi sehingga berlanjut dengan konflik horizontal dan vertikal yang dipelopori oleh mahasiswa. Dampak selanjutnya adalah ditangkapnya Bupati Buol dan dipenjarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Konflik yang terjadi di Kabupaten Morowali, dipicu oleh persoalan pemekaran wilayah, pemindahan ibu kota kabupaten yang menyebabkan terjadinya pengrusakan dan pembakaran bangunan milik pemerintah. Selain itu, terjadi pula persaingan pemanfaatan sumber daya alam sehingga mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dan korban jiwa.

- Rizali Djaelangkara (2011) dalam makalahnya menyebutkan bahwa permasalahan kebudayaan yang mengemuka di Kabupaten Morowali adalah (a) adanya perasaan marjinalisasi penduduk lokal, (b) masalah perbatasan desa, (c) persaingan dalam pengelolaan potensi tambang, (d) pemilu dan recruitment politik, (e) egoisme kewilayahan.
- c. Kabupaten Tojo Una-Una adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Poso, penduduknya mayoritas beragama Islam. Ketika pecah konflik tahap pertama di Kabupaten Poso, masyarakat Tojo Una-Una datang membantu umat Islam di Poso yang sedang bertikai dengan penduduk Poso yang beragama Kristen.
- Rizal Djaelangkara dalam makalahnya (2011) menyebutkan beberapa permasalahan kebudayaan di Kabupaten Tojo Una-Una, antara lain: (a) persaingan dalam pengelolaan sumber daya tambang, (b) terjadi persaingan pengelolaan pulau-pulau kecil antara masyarakat dengan investor, (c) dampak pengelolaan potensi wisata terhadap memudarnya kearifan lokal masyarakat, (d) terjadi proses akulturasi antara budaya kelompok etnis lokal dengan budaya kelompok etnis pendatang, (e) persaingan pengelolaan teluk Tomini, dan (f) persoalan politik yang pro dan kontra masyarakat terhadap pemekaran Sulawesi Timur.
- d. Konflik vertikal terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan seperti yang dikutip oleh Haliadi (2009) dari buku yang ditulis oleh Hasdin Mondika berjudul "Banggai Darussalam: Solusi di tengah Krisis". Dalam buku itu digambarkan bahwa Kabupaten Banggai setelah masuk dalam bingkai NKRI, terjajah lagi yang menjadi akar konflik, baik di Kabupaten Banggai maupun Kabupaten Banggai Kepulauan. Konflik terjadi terutama dipicu oleh persoalan pemekaran wilayah dan pemindahan ibu kota dari Banggai ke Salakan pada awal tahun 2007.
- e. Konflik antara warga masyarakat beberapa desa di Kabupaten Sigi yang berupa perkelahian antara pemuda karena sikap saling menghina, perkelahian antar warga masyarakat desa karena masalah perbatasan wilayah, persoalan penyerobotan lahan di wilayah Taman Nasional Lore Lindu dan berbagai permasalahan lainnya.
- f. Kasus-kasus konflik di Kota Palu adalah berbentuk perkelahian antar siswa sekolah, persaingan mengases sumber daya alam di pasar, tindakan aparat keamanan yang bersifat arogan, perkelahian pemuda antar desa, persoalan mabuk karena minuman keras dan judi, dan berbagai persoalan budaya lainnya. Muhammad Marzuki (2011) menyebutkan bahwa konflik horizontal paling menonjol di Kota Palu dan sekitarnya adalah persaingan antara pedagang etnik Bugis dengan etnik Kaili Da'a di Pasar Masomba dan Pasar Manonda.
- Selain itu, terjadi konflik laten antara desa Nunu dengan desa Tawanjuka Palu yang dilatar belakangi oleh sejarah kerajaan masa lampau. Demikian pula konflik horizontal antara etnik Kaili Da'a dan etnik Kaili Ledo pada tahun 1948 dan tampaknya masih terdapat benih-benih konflik laten yang dapat berubah menjadi konflik terbuka dalam situasi dan waktu tertentu yang juga akarnya dari persoalan kebudayaan dan sejarah kerajaan masa lampau.

2. Kesenjangan Etos Kerja Antar Suku Bangsa

Kesenjangan etos kerja atau budaya kerja antar suku bangsa di provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu permasalahan kebudayaan yang aktual dari dahulu sampai saat ini karena berkaitan langsung dengan sumber mata pencaharian, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Fenomena tersebut terjadi pada semua masyarakat di Sulawesi Tengah. Suku bangsa migran baru sangat agresip

untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam yang luas sebagai infestasi masa depan dan sebaliknya suku bangsa migran lama hanya menguasai dan mengerjakan sumber daya alam seadanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam waktu jangka pendek.

Dampak dari kesenjangan etos kerja dan penguasaan sumber daya alam strategis oleh suku bangsa migran baru yang memiliki etos kerja tinggi, sering diberi label memiliki sifat monopoli dan bahkan dipandang sebagai penjajah baru setelah pihak Hindia Belanda meninggalkan wilayah Sulawesi Tengah. Fenomena sosial budaya seperti itu terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat, baik pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, maupun pada sektor jasa dan sektor-sektor lainnya.

Kesenjangan etos kerja dan penguasaan sumber daya alam strategis antara suku bangsa migran lama dengan suku bangsa migran baru merupakan salah satu potensi konflik di wilayah Sulawesi Tengah. Berbagai peristiwa konflik di wilayah Sulawesi Tengah yang dipicu oleh hal tersebut, seperti konflik yang terjadi di Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Tojo Una-Una, Toli-Toli, Buol, Banggai, dan Banggai Kepulauan.

3. Permasalahan Isu Suku Bangsa Asli

Masyarakat Sulawesi Tengah masih mempersoalkan tentang konsep suku bangsa asli/putra daerah yang dipertentangkan dengan suku bangsa/putra pendatang, terutama ketika menjelang pemilihan kepala desa, bupati, gubernur dan promosi jabatan strategis. Permasalahan kebudayaan itu sering mengemuka pada berbagai wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah tersebut sudah barang tentu membawa dampak negatif terhadap proses interaksi dan integrasi suku bangsa yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Kebiasaan Mengonsumsi Minuman Terlarang

Sebagian warga masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman terlarang seperti minuman keras dan narkoba. Sebagaimana diketahui bahwa konflik di Poso pada awalnya dipicu oleh seorang pemuda suku bangsa Pamona yang mabuk karena minuman keras. Kebiasaan mengonsumsi minuman keras bagi masyarakat Pamona merupakan tradisi yang dilakukan setiap selesai makan. Kebiasaan tersebut terkadang membawa dampak buruk berupa perkelahian antar warga masyarakat, terutama para pemuda.

Selain minuman keras dan perilaku mabuk-mabukan, generasi muda di berbagai kota di kabupaten banyak yang mengonsumsi Narkoba. Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Narkoba Kota Palu bahwa masyarakat Kota Palu (terutama generasi muda) termasuk ranking 7 (tujuh) pemakai narkoba di Indonesia

5. Tarian *Modero*

Seni tari "*modero*" adalah salah satu unsur kebudayaan suku bangsa Pamona di Kabupaten Poso yang berfungsi sebagai penjemput tamu penting. Wujud asli tarian *modero* adalah beberapa orang tua (perempuan) berpakaian adat berdiri dan mengayung-ayungkan kedua tangannya sambil menyanyi untuk menyambut tamu yang datang.

Wujud tarian *modero* itu pada awalnya tidak menarik minat generasi muda di Kabupaten Poso. Namun pada masa Kolonial Belanda memerintah di Kabupaten Poso, tarian *modero* dimodifikasi, yaitu peserta *modero* bergandengan tangan antara laki-laki dan perempuan berbentuk lingkaran sambil menari-nari dan melangkahakan kaki bergerak berputar ke kanan sambil diiringi lagu-lagu berupa pantun percintaan. Tarian *modero* biasanya dilaksanakan di

pekarangan rumah atau kantor dan berlangsung sampai larut malam dan sampai diri hari.

Praktek unsur kebudayaan yang berupa tarian *modero* ini menimbulkan permasalahan, yaitu: (a) ada peserta *modero* yang sudah mengkonsumsi minuman keras dan mabuk sehingga muncul perkelahian diantara mereka; (b) peserta *modero* yang baru masuk, biasanya melepas tangan orang yang sudah bergandengan tangan antara pria dan wanita sehingga menimbulkan ketersinggungan dan perkelahian; (c) nyanyian yang mengiringi *modero* menggunakan pengeras suara dan berlangsung sampai larut malam sehingga para tetangga merasa terganggu dan mengajukan protes.

C. STRATEGI SOLUSI PERMASALAHAN KEBUDAYAAN

Sistem nilai budaya atau budaya berpikir positif suku bangsa yang multi-kultur di Indonesia yang telah mengalami “*degradasi*” seperti diuraikan pada bagian sebelumnya sangat perlu diidentifikasi, direvitalisasi dan ditransformasikan kepada generasi muda setiap warga suku bangsa melalui pendidikan. Adapun strategi solusi permasalahan kebudayaan di Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia umumnya, harus dilakukan secara komprehensif melalui model-model sebagai berikut:

1. Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Nilai-nilai budaya lokal suku bangsa yang telah digali perlu diajarkan kepada generasi muda melalui 7 lingkup sasaran utama sesuai Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010), yaitu:

a. Lingkup keluarga sebagai wahana pembelajaran budaya berpikir positif melalui orang tua dan orang dewasa terhadap anak-anak maupun anggota keluarga lainnya, sehingga memahami dan mengamalkan sistem nilai budaya dalam kehidupannya,

- b. Lingkup satuan pendidikan sebagai wahana pembelajaran budaya berpikir positif sehingga peserta didik memahami dan menerapkannya dalam hidup bermasyarakat,
- c. Lingkup pemerintah sebagai wahana pembangunan sistem nilai budaya dan budaya berpikir positif sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara sehingga menjadi teladan bagi rakyatnya,
- d. Lingkup masyarakat sipil melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam mewarisi dan menerapkan budaya berpikir positif suku bangsa masing-masing,
- e. Lingkup masyarakat politik sebagai wahana menerapkan budaya berpikir positif sehingga menjadi teladan bagi masyarakat konsituennya,
- f. Lingkup dunia industri sebagai wahana pembangunan perekonomian dengan berpedoman pada budaya berpikir positif sehingga menjadi teladan bagi masyarakat pengusaha ekonomi menengah ke bawah,
- g. Lingkup media massa sebagai wahana yang berperan dalam membuat opini bagi publik yang berkaitan dengan budaya berpikir positif dan penerapannya dalam masyarakat.

2. Pendidikan Etika

Berdasarkan berbagai keluhan yang disampaikan oleh banyak kalangan tentang menurunnya etika generasi muda dewasa ini, maka pendidikan etika perlu digalakkan kembali, baik di rumah tangga, pada lembaga pendidikan maupun pada lingkungan masyarakat sipil supaya dapat tercipta sikap dan perilaku positif antara lain seperti:

- a. Dapat membedakan perilaku yang benar dan salah;
- b. Ramah-tamah dalam berbicara;
- c. Sopan-santun dalam pergaulan;
- d. Simpati terhadap orang lain;

- e. Solidaritas terhadap sesama manusia dan suku bangsa lain;
- f. Mengutamakan persatuan dan kesatuan;

3. Pendidikan Multikultural

Pemikiran multikulturalisme menurut H.A.R. Tilaar (2005) adalah mengandung tiga masalah pokok, yaitu (1) identitas kelompok; (2) globalisme; (3) nasionalisme. Ketiga hal itu perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan multikultural, baik di rumah tangga, lembaga pendidikan maupun lingkungan masyarakat agar tumbuh sifat-sifat:

- a. Memahami budaya sendiri sebagai identitas suku bangsanya;
- b. Memahami dan menghargai budaya suku bangsa lain;
- c. Menghormati perbedaan budaya antar suku bangsa;
- d. Menjunjung tinggi persamaan budaya antar suku bangsa;
- e. Mengakui hak dan keberadaan setiap orang sebagai warga suku bangsa lain;
- f. Mengembangkan dialog dan toleransi antara sesama manusia dan suku bangsa.
- g. Memahami dan mengamalkan nilai universalitas agama seperti: cinta sesama manusia, kasih sayang, mengajarkan kebaikan dan perdamaian.

Apabila pendidikan multikultural terintegrasi berhasil dilakukan dalam masyarakat, maka setiap orang akan memiliki ketrampilan budaya yang terdiri atas lima S; yaitu: (1) suka senyum; (2) suka menyapa; (3) sopan; (4) santun; dan (5) sabar.

4. Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda

Generasi muda yang ada pada kota-kota dan desa-desa di wilayah Sulawesi Tengah sebagian besar belum memiliki pekerjaan tetap dan bahkan sebagian masih menganggur sehingga bersifat labil, frustrasi dan gampang dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan demo, tindakan anarki dan kerusuhan.

Oleh karena itu, para pemuda perlu diberdayakan secara ekonomi produktif dengan model pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Generasi muda dilatih dalam berbagai macam usaha produktif;
- b. Dibagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya terdiri dari unsur suku bangsa dan golongan agama yang berbeda;
- c. Setiap kelompok diberikan modal (uang dan peralatan) untuk mengelola usaha produktif sesuai dengan ketrampilan yang sudah dimiliki;
- d. Selama mengelola usaha produktif, didampingi oleh seorang fasilitator profesional;
- e. Setelah satu tahun menjalankan usahanya, dievaluasi oleh suatu tim.

D. PENUTUP

Permasalahan kebudayaan mencul karena telah terjadi degradasi sistem nilai budaya atau budaya berpikir positif pada setiap suku bangsa sehingga kurang berfungsi lagi sebagai pedoman tingkah laku manusia. Degradasi sistem nilai budaya tersebut terjadi karena kepentingan materi (jabatan, kekuasaan, dan harta benda) sangat dominan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengeliminir permasalahan kebudayaan di Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya, ada beberapa pendekatan yang perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu (1) perlu penggalian dan transformasi budaya berpikir positif setiap suku bangsa kepada generasi muda, (2) pendidikan etika perlu digalakkan kepada generasi muda, baik di rumah tangga maupun di sekolah, (3) pendidikan multikultur perlu dimasukkan dalam kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi, (4) pemberdayaan ekonomi para pemuda.

Demikianlah beberapa permasalahan kebudayaan yang aktual di Sulawesi

Tengah yang dapat dihimpun dalam tulisan ini. Tentu saja masih ada permasalahan kebudayaan yang belum sempat ditemui karena masalah keterbatasan waktu dan literatur. Semoga tulisan ini ada manfaatnya dalam rangka kongres kebudayaan yang akan dilaksanakan tahun 2013.

Palu dan Donggala. Hasil Penelitian Hibah Bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Jamas. 1956. *Tanah Kaili*. Palu: Djawatan Penerangan RI Kabupaten Donggala.
- A. Hasan Machmud. 2000. *Kumpulan Petuah Bugis-Makassar*. Jakarta: Saudagar.
- Chang, William. 2003. *Konflik Komunal di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Harris P dkk, ed. 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar*. Jakarta: Internasioanl Idea.
- H.A.R. Tilaar. 2005. *Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sejarah*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta: Karya Agung.
- Hendricks, William. 2000. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jaelangara, Rizali. *Kerentanan dan Potensi Konflik di Sulawesi Tengah*. Makalah disampaikan dalam dialog kebudayaan di Palu, tanggal 5 Desember 2011
- Koentjaraningrat. 1983. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Gramedia.
- Latif. Juraid Abd. *Konflik Vertikal dan Horizontal di Kabupaten Buol dan Tolitoli*. Makalah disampaikan dalam dialog kebudayaan di Palu tanggal 5 Desember 2011.
- Mamar, Sulaiman, dkk. 2003. *Menemukan Sumber Potensi Konflik di*

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm, kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm. Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori (g) metode penulisan (jika diperlukan); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (i) penutup; (j) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (rujukan buku)

Hill, Erica. 1998. Gender-informed archaeology: the priority of definition, the use of analogy, and the multivariate approach" dalam *Journal of Archaeological Method and Theory*, vol.5, no. 1. (rujukan jurnal ilmiah)

Hugo, Graeme J. et al. 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development*. New York: Oxford University Press. (Rujukan buku dengan 4 pengarang atau lebih)

Landa, Apriani. 17 Juli 2008. "Tekad Siswa Bersih Narkoba" dalam *Tribun Timur*. hlm 14. (rujukan surat kabar/majalah).

Parsudi, Suparlan. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss*. Online. (<http://prasetyo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss>). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan internet)

6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Jurnal Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo

Kampus Bumi Tri Dharma Anduonohu Kendari 393231

Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO

Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 393231

Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



9 772252 014015